

KETERPILIHAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PARTAI GOLKAR PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN SIDRAP

Women Legislative Candidate Desirability of Golkar Party in the Legislative Election of 2014 in Sidrap Regency

Mutmainnah

Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Email: mutmainnah_lc@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keterpilihan calon legislatif perempuan yang terpilih hanya satu orang pada pemilihan legislatif tahun 2014 di Kabupaten SIDRAP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat di simpulkan oleh penulis, yaitu sebagai berikut: keterpilihan perempuan pada pemilihan legislatif di Kabupaten SIDRAP sangat rendah, dari 4 daerah pemilihan yang telah terpenuhi kuota 30% perempuan yang terpilih hanya satu perempuan dari partai GOLKAR. Rendahnya keterpilihan perempuan sangat di pengaruhi dari rekrutmen partai GOLKAR yang kurang serius, hanya melihat popularitas dan ketokohan keluarga di setiap daerah pemilihan bukan kapabilitas perempuan itu sendiri sehingga berdampak pada calon legislatif yang kurang mampu untuk melakukan sosialisasi di masyarakat agar mereka dipilih. Perilaku pemilih perempuan yang masih tradisonal yang memilih calon legislatif atas dasar kekeluargaan yang masih kuat di Kabupaten SIDRAP membuat calon legislatif perempuan kurang terpilih. Kebijakan affirmative action hanya sebagai syarat pencalonan tetapi tidak menjadi jaminan untuk terpilih bagi perempuan. Adapun saran penelitian adalah calon legislatif perempuan harus di bekali pendidikan dari awal terkait masalah partai politik supaya mampu untuk bersaing dengan calon legislatif yang lain. Partai GOLKAR merekrut perempuan yang berkapabilitas bukan sekedar pengisi kekosongan kuota yang merupakan syarat partai menjadi peserta PEMILU legislatif. Perempuan dapat memperjuangkan aspirasi mereka sehingga tidak termajinalkan dari berbagai sektor pembagungan termasuk partai politik.

Kata kunci: Keterpilihan Perempuan, Affirmative Action, Perilaku Pemilih

ABSTRACT

Purpose of this study was to analyze the election of women candidates were elected only one person on the legislative elections in 2014 in Sidrap. Based on the research and previous discussion, it can be concluded by the authors, is as follows: the election of women of women in legislative elections in Sidrap very low, from 4 constituency which has fulfilled the quota of 30% women elected only one woman from the party Golkar. The low election of women is influenced from the Golkar party recruitment is less serious, just look at the popularity and the figure of the family in each electoral district not the women themselves capability so the impact on the legislative candidates who are less able to socialize in the community so that they have. The behavior of female voters are still traditional choosing of candidates on the basis of family is still strong in Sidrap make less women candidates elected. Affirmative action policies only as a condition of candidacy but is not a guarantee of being selected for women. The research suggestions are women candidates should be in the Arm of early education-related issues political parties to be able to compete with other legislative candidates. Golkar Party to recruit women who have the capability not just stopgap quota which is a condition of the party participated in the legislative ELECTION. Women can fight for their aspirations so as not marginalized from various development sectors including political parties.

Keywords: election of women, Affirmative Action, Voter Behavior

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara demokrasi, PEMILU merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat, sekaligus prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Melalui PEMILU rakyat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini diserahi mandat kedaulatan rakyat untuk mengurus negara. PEMILU merupakan sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi PEMILU adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada (Jurnal KIPP, 2015: 20).

Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014 ada 15 partai menjadi peserta PILEG tiga diantaranya merupakan partai lokal yang telah memenuhi syarat. Partai politik sebagai organisasi berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Dengan adanya sistem ini, nantinya dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi, serta memiliki potensi untuk dikembangkan yang perlu direkrut. Selain merekrut di dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kadernisasi kader-kader politiknya (Firmanzah, 2008: 70).

Kemajuan tatanan hukum politik di Indonesia, dapat dilihat dengan adanya prinsip kesetaraan gender dalam instrument perundang-undangan sebagaimana pada UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Tampaknya tidak diperkenankan partai politik menyimpangi sistem kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dengan alasan apapun. *Affirmative Action* merupakan tahapan untuk mencapai keadilan gender sebagai program khusus untuk lebih memungkinkan perempuan memainkan perannya dalam masyarakat sesuai kemampuan/talentanya. Dalam sistem pemilihan parlemen diberikan kesempatan secara khusus bagi kalangan perempuan untuk memungkinkan menjadi anggota parlemen. Mekanismenya dapat dilakukan melalui metode *zippe* atau *zig-zag method*. Dalam hal ini misalnya setiap 3 atau 4 calon minimal ada 1 perempuan (Anugrah, Astird, 2009: 9).

Penyimpangan yang terjadi dianggap sebagai pemicu menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai tertentu. Untuk itu, dalam mendapatkan atau mempertahankan kepercayaan masyarakat sebagai upaya mempertahankan elektabilitas partai dibutuhkan berbagai strategi serta dengan melemparkan isu atau janji demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Elektabilitas partai politik sangat berpengaruh pada calon kandidat. Seperti halnya pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 di kabupaten SIDRAP

bahwa dari 12 partai politik peserta PILEG yang telah memenuhi kuota 30% perempuan di setiap DAPIL hanya CALEG perempuan yang berasal dari partai GOLKAR yang terpilih.

Partai GOLKAR merupakan partai sangat mapan dan memiliki kekuasaan yang sangat besar di Kabupaten SIDRAP. Keberadaan partai GOLKAR di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat berpengaruh dalam proses politik dan pemerintahan. Partai GOLKAR di Kabupaten SIDRAP mampu membuktikan kinerjanya dengan memperoleh kursi terbanyak di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 9 kursi pada hasil pemilihan legislatif tahun 2014 diantaranya 8 anggota legislatif laki-laki dan 1 anggota legislatif perempuan.

Pada pemilihan legislatif tahun 2014 terdapat 4 daerah pemilihan di Kabupaten SIDRAP dengan jumlah calon legislatif perempuan partai GOLKAR 12 orang. Dari jumlah calon legislatif perempuan yang sudah cukup banyak seharusnya bisa meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif, namun hal ini tidak sesuai dengan hasil dari pemilihan legislatif yang hanya terpilih satu perempuan. Rendahnya keterpilihan perempuan sangat di pengaruhi dari mekanisme rekrutmen partai GOLKAR yang lebih cenderung merekrut perempuan dengan melihat popularitas atau ketokohan keluarga di setiap DAPIL bukan kapabilitas perempuan.

Rekrutmen partai GOLKAR yang cenderung dengan adanya ikatan kekeluargaan terhadap calon legislatif perempuan itu sendiri, tidak jarang perempuan yang menjadi calon legislatif tidak dikenal atau tidak di ketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat kurang memilih perempuan. Seperti halnya Hj. Helmis calon legislatif di DAPIL 2 yang merupakan anak dari pengurus kecamatan partai GOLKAR di DAPIL 2 yang sudah tiga periode menjadi calon legislatif di partai GOLKAR namun tidak pernah terpilih menjadi anggota legislatif. Selama menjadi calon legislatif sosialisasi dan interaksi tidak terjalin di masyarakat hal ini sangat mempengaruhi elektabilitasnya.

Berbeda calon legislatif Dra. Hj. Sitti Rahmah, M.Si dari DAPIL 4 merupakan calon yang terpilih menjadi anggota legislatif yang juga memiliki latar belakang GOLKAR dan selalu aktif dalam berbagai organisasi sayap partai GOLKAR termasuk organisasi AL hidayah yang merupakan organisasi yang menerima anggota dari kalangan PNS, setelah sitti rahmah pensiun kemudian aktif di organisasi inti partai GOLKAR sebagai langkah awal untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Selama dua periode PILEG di Kabupaten SIDRAP terdaftar menjadi CALEG namun di periode pertama tidak terpilih dan di periode kedua terpilih menjadi anggota legislatif dan satu-satunya perempuan yang berasal dari partai GOLKAR.

Perempuan dalam pemilihan legislatif memiliki kapabilitas dan figur yang cenderung rendah hal ini menjadi keterbatasan untuk mengsosialisasikan program-program mereka untuk memperoleh suara dari pemilih serta adanya ketimpangan gender yang menjadi indikasi perempuan termarginalkan di lembaga politik dimulai dari kendala budaya, agama, ekonomi dan dukungan keluarga.

Fenomena ini juga tergambar dalam hasil riset Kambo (2017) yang menunjukkan keterkaitan antara kesetaraan gender dan kapabilitas calon perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Luwu Utara. Rahman, Harsono dan Dewi (2017) juga menemukan bahwa kader perempuan dijadikan sarana untuk memenuhi persyaratan Pemilihan Legislatif di kabupaten Ponorogo. Nimrah dan Sakaria (2015) dalam risetnya menyayangkan keterlibatan kaum perempuan di ranah politik, masih jauh dari harapan. Sedangkan, Silaban (2015) dalam risetnya di Makassar pada Pemilu tahun 2009 menunjukkan bahwa perempuan belum menunjukkan ketertarikan yang cukup untuk terlibat dalam politik. Namun, partai politik masih enggan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan politik dan perempuan di atas menunjukkan bahwa kasus yang terjadi di Luwu Timur, Ponorogo dan Makassar lebih menitikberatkan pada kapasitas perempuan yang seringkali diragukan ketika menghadapi proses pencalonan, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Hal ini secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap perilaku pemilih perempuan. Perempuan diketahui memiliki tingkat integritas sesama perempuan yang rendah, sehingga kecenderungan memilih laki-laki. Kemudian ada sejumlah perempuan tertentu kurang senang melihat perempuan lain berhasil/terpilih sebagai anggota legislatif. Dalam pemilihan perempuan lebih senang mengandalkan hubungan keluarga dibandingkan hubungan politik sehingga berdampak pada tingkat keterpilihan perempuan.

Perilaku pemilih pada pemilihan legislatif dapat dipengaruhi oleh kampanye politik berupa program kandidat, dan politik uang yaitu kekuatan modal dapat pula diduga banyak dipengaruhi oleh sejauh mana peran media sosialisasi. Sosialisasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan pelaksanaan pemilihan legislatif sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golongan putih. Sehingga, tujuan penelitian ini adalah menganalisis calon legislatif perempuan yang terpilih hanya dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Sidrap.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan tipe penelitian deskripsi kualitatif dalam melihat kondisi sosial perempuan dalam bidang politik harus dilihat dan dilukiskan keseluruhan fenomena sosial terkait persoalan tersebut. Penelitian mengacu pada indentifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda atau peristiwa. Penelitian dimaksudkan mengumpulkan informasi mengenai status gejala pada saat penelitian. (Silalahi, Ulbert, 2012: 29).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten SIDRAP, fokus penelitian di Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yakni penelitian menetapkan informan berdasarkan asumsi bahwa informan dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian sesuai dengan pengetahuan maupun keterlibatan mereka dengan yang diteliti.

Sebagaimana lazimnya pada penelitian kualitatif, data dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan atau narasumber ditetapkan berdasarkan teknik tertentu sebelumnya. Sedangkan, Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dari dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) mengacu pada pedomanagar wawancara tetap berada pada fokus penelitian. Proses pengumpulan diawali dengan membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator-indikator pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang nantinya berkembang dalam wawancara. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat.

Teknik analisis data merupakan proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan interpretasi. Analisis data mempunyai dua tujuan, yakni meringkas dan menggambarkan data (*to summarize and describe tde data*) dan membuat referensi dari data. Analisis berarti kategorisasi, penataan, manipulasi, dan peningkatan data untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan peneliti. (Silalahi: 2012: 332).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Partai politik membentuk landasan masyarakat demokratis. Partai mengumpulkan kepentingan publik, mengartikulasikannya dalam bentuk pilihan kebijakan dan memberikan

struktur untuk berpartisipasi dalam politik. Selain itu, melatih para pemimpin politik dan melakukan pemilihan umum untuk mencari ukuran kontrol atas lembaga pemerintah. Ketika menjadi mayoritas, partai memberikan basis organisasi untuk membentuk pemerintah, dan ketika menjadi minoritas, partai menjadi oposisi, atau alternatif terhadap pemerintah. Ketika terpilih, kandidat berusaha untuk memajukan kepentingan partai mereka di badan legislatif, mewakili agenda kebijakan tertentu yang memiliki legitimasi dari mandat pemilihan yang populer.

Partai GOLKAR ditetapkan sebagai partai peraih suara terbanyak pada PEMILU legislatif 9 April 2014 di Kabupaten SIDRAP. Partai GOLKAR di Kabupaten SIDRAP masih memiliki pengaruh sangat besar di masyarakat sehingga tetap memiliki suara terbanyak, namun hal ini tidak sebanding dengan keterpilihan calon legislatif perempuan yang masih memiliki pengaruh yang sangat rendah di masyarakat. Pada tabel di bawah merupakan hasil perolehan suara partai politik pada PILEG 2014 di Kabupaten SIDRAP.

Tabel 1.

**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PILEG TAHUN 2014
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

| NO | PARPOL | KABUPATEN SIDRAP | | | | JUMLAH | CALEG TERPILIH | | |
|--------|----------|------------------|----------|-----------|----------|--------|----------------|---|--------|
| | | DAPIL I | DAPIL II | DAPIL III | DAPIL IV | | L | P | JUMLAH |
| 1 | GOLKAR | 8280 | 10705 | 10110 | 13024 | 42119 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | NASDEM | 4472 | 4869 | 4194 | 6573 | 20108 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | PKS | 8676 | 3840 | 4540 | 2080 | 19136 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | PAN | 1362 | 4186 | 5249 | 3444 | 14241 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | GERINDRA | 1018 | 4184 | 2755 | 5275 | 13232 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | DEMOKRAT | 2513 | 3511 | 4444 | 2519 | 12987 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | PPP | 1875 | 1923 | 4670 | 2395 | 10863 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | PKPI | 4902 | 2817 | 1178 | 1180 | 10077 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | PBB | 831 | 3829 | 600 | 3281 | 8541 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | HANURA | 672 | 3578 | 2572 | 1594 | 8416 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | PKB | 3121 | 1781 | 678 | 302 | 5882 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | PDIP | 2263 | 219 | 2413 | 457 | 5352 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 39985 | 45442 | 43403 | 42124 | 170954 | 34 | 1 | 35 |

Sumber: KPUD Kabupaten SIDRAP

Berdasarkan dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa, diantara 12 partai peserta PILEG tahun 2014 yang terbagi dalam 4 DAPIL hanya 1 orang CALEG perempuan dari partai GOLKAR yang terpilih. Dengan hasil tersebut berarti bahwa keterwakilan perempuan

dalam parlemen masih sangat minim dan juga ketersediaan kuota 30% perempuan perDAPIL di tiap partai belum mampu dimaksimalkan.

Ahmad Salihin selaku anggota DPRD Kabupaten SIDRAP dari Fraksi GOLKAR mengatakan: “Tingkat keterpilihan perempuan masih sangat rendah, dengan alokasi kursi DPRD Kabupaten SIDRAP yang bertambah dari 30 menjadi 35 kursi tetap saja hanya satu perempuan yang terpilih. (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2017). Meskipun alokasi kursi di DPRD Kabupaten SIDRAP bertambah, peluang untuk terpilih juga semakin besar, tetapi kenyataannya hanya 1 calon legislatif perempuan yang terpilih sedangkan pemilih perempuan lebih banyak di banding laki-laki, pemilih perempuan berjumlah 116.544 dan pemilih laki-laki berjumlah 108.365 di Kabupaten SIDRAP. Berdasarkan data dari hasil PILEG tahun 2014 di Kabupaten SIDRAP, dimana partai GOLKAR sebagai peraih suara tertinggi dan sekaligus satu-satunya partai politik yang memiliki satu orang wakil rakyat perempuan di DPRD Kabupaten SIDRAP. Meskipun elektabilitas partai GOLKAR sangat tinggi belum pasti bahwa elektabilitas kandidat perempuan dalam partai tersebut juga tinggi, terbukti bahwa hanya satu orang CALEG perempuan yang terpilih pada PILEG 2014 di Kabupaten SIDRAP

Mansur, S.pd mengatakan “Rendahnya keterpilihan perempuan sangat di pengaruhi oleh rekrutmen partai GOLKAR yang dilakukan dengan system kekeluargaan, artinya partai hanya melihat figur dan pengaruh keluarga/orang tuanya di partai tidak melihat potensi dan kapabilitas perempuan untuk menjadi calon legislatif.” (Wawancara pada tanggal 28 Juli 2017). Pengaruh ketokohan keluarga calon legislatif perempuan sangat di pertimbangkan oleh partai GOLKAR dalam merekrut perempuan sebagai calon legislatif dari dasar ini partai tidak melihat kapabilitas perempuan untuk direkrut menjadi calon legislatif sehingga pada saat pemilihan calon legislatif tersebut tidak dikenal oleh masyarakat, hal ini menjadi kurangnya pemilih untuk memilih perempuan.

Kurangnya kegiatan politik yang di selenggarakan partai GOLKAR dengan melibatkan perempuan sebagai salah satu kurangnya perempuan dalam partai politik. Kasman dalam kutipan Wawancara mengungkapkan: “Partai GOLKAR tidak melakukan rekrutmen perempuan di masyarakat. Rekrutmen pengurus saja sangat kacau, misalnya nama-nama pengurus tingkat desa hanya sekedar asal tulis nama dan tidak diketahui oleh si pemilik nama (termasuk saya diangkat menjadi sekretaris pengurus partai GOLKAR di desa tetapi saya tidak mengetahuinya bahwa ada nama saya di kepengurusan desa)”.(Wawancara pada tanggal 31 Juli 2017).

Partai GOLKAR di Kabupaten SIDRAP sangat berperan dalam kadernisasi perempuan dalam meningkatkan kualitas dan mampu bersaing dengan calon legislatif laki-laki, selain dari disiplin ilmu yang dimiliki calon legislatif, modal sosial dan modal ekonomi calon legislatif perempuan yang terpilih sangat mendukung. Husniah, S.Pd mengungkapkan, dalam kutipan wawancara: “Terpilihnya ibu Siti Rahmawati di DAPIL 4 karna sangat dikenal di daerahnya sendiri, sosialisasi di masyarakat sangat tinggi, beliau juga sebagai PNS selama 34 tahun, sangat jelas bahwa banyak yang mengenal beliau kemudian bisa dilihat dari finansial sangat mendukung jika beliau terpilih”. (Wawancara pada tanggal 2 September 2017).

Dalam pemilihan calon legislatif di Kabupaten SIDRAP tahun 2014 sangat dipengaruhi modal ekonomi, modal ini sangat penting bagi CALEG karna pemilih sangat mudah untuk dipengaruhi dengan isu-isu ekonomi sehingga sebagian calon legislatif memanfaatkan moment tersebut. Muslihat, SE mengatakan dalam kutipan wawancara: “Salah satu kendala calon legislatif perempuan tidak terpilih dipengaruhi dengan modal ekonomi calon legislatif perempuan walaupun disiplin ilmu sudah layak tetapi keuangannya kurang sangat sulit untuk terpilih, pemilih perempuan sangat mudah untuk dipengaruhi oleh uang dan tidak melihat kapabilitas perempuan, padahal saat ini sudah ada kebijakan kuota 30% terhadap perempuan yang memberikan ruang terhadap perempuan untuk berpartisipasi”. (Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2017). Dalam pemilihan calon legislatif partai harus memenuhi minimal 30% kuota perempuan sebagai syarat untuk menjadi peserta PEMILU legislatif. H. Abd Haris, SE mengatakan dalam kutipan wawancara: “*Affirmative action* merupakan regulasi yang diatur dalam UU PEMILU bahwa setiap partai harus memenuhi minimal kuota 30% perempuan. Partai GOLKAR telah melakukan rekrutmen dari desa/kelurahan sampai kabupaten, respon perempuan terkait kebijakan ini masih rendah bahkan partai sebesar GOLKAR mengalami kesulitan untuk memenuhi kuota akhirnya perempuan hanya sekedar pengisi kuota yang tidak dibekali dari awal dan orientasi politik”. (Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2017).

Partai hanya merekrut perempuan untuk mengisi kekosongan kuota, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua calon legislatif perempuan yang mengikuti PEMILU legislatif 2014 adalah murni kader Partai GOLKAR. Ada beberapa calon legislatif hanya mengisi kekosongan kuota calon legislatif dari partai GOLKAR. Kekuatan tokoh memang masih bertumpu pada ikatan primordial, khususnya ikatan keluarga (famili) dan kesukuan. Tetapi banyaknya calon legislatif yang berasal dari satu keluarga besar yang sama, cukup menyulitkan CALEG lain dari Partai GOLKAR untuk bersaing pada PEMILU legislatif

2014. Partai GOLKAR kurang memberikan pendidikan politik terhadap perempuan dari awal sebagai landasan bagi calon legislatif perempuan untuk mendapatkan suara lebih banyak di masyarakat, kurangnya pengetahuan perempuan terkait politik sangat berdampak pada keterpilihan perempuan yang mengakibatkan perempuan kurang mampu melakukan sosialisasi dengan konstituennya.

Sistem PEMILU adalah proses perekrutan kandidat perempuan dalam setiap PEMILU dianggap penting sebagai prediktor penting dalam menjelaskan naiknya reseprentatif perempuan. Yuliana mengungkapkan dalam kutipan wawancara: “Tidak mengetahui adanya calon legislatif perempuan, tidak mengenal calon legislatif perempuan dan tidak pernah melakukan sosialisasi di masyarakat agar dapat dikenal. Karna adanya keluarga yang menjadi calon legislatif (laki-laki) maka yang dipilih CALEG laki-laki dan melihat dari ketokohnya layak menjadi anggota legislatif”. (Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2017).

Pembahasan

Elektabilitas berasal dari kata *electability* (bahasa Inggris), diturunkan dari kata *elect* (memilih). Bentuk-bentuk turunan dari kata *elect* antara lain *election*, *electable*, *elected*, *electiveness*, *electability*, dan sebagainya. Elektabilitas dalam pemaknaan politik adalah tingkat keterpilihan suatu partai, atau kandidat yang terkait dengan proses pemilihan umum. Popularitas sering dikaitkan dengan elektabilitas, namun memiliki makna yang berbeda. Popularitas lebih banyak berhubungan dengan dikenalnya seseorang, baik dalam arti positif ataupun negatif. Sementara elektabilitas berarti kesediaan orang memilihnya untuk jabatan tertentu. Artinya, elektabilitas berkaitan dengan jenis jabatan yang ingin diraih. (Gosal, Indra, 2015: 14).

Robert Tanenbaum (<http://virtusvigoss.blogspot.com/2011/05/>), pemimpin politik adalah mereka yang menggunakan wewenang-wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan atau rakyat yang bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan politik yakni kesejahteraan rakyat. Syarat umum itu, dalam teori politik modern, dirumuskan dalam tiga hal, yakni: (1) akseptabilitas; (2) kapabilitas, dan (3) integritas.

Dalam meningkatkan keterpilihan calon legislatif sebagai peserta PEMILU hendaknya memperhatikan faktor-faktor pendorong yang mampu mendorong suara pemilih untuk memilihnya. Memiliki modal dianggap perlu oleh para calon legislatif di PEMILU. Umumnya ada tiga modal yang dipakai calon legislatif dalam PEMILU, yaitu modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. (Misykiyah, Noviia Nailul, 2016: 7). Ketiga modal itu

memang bisa berdiri sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan antara satu dengan yang lain. Tetapi di antara ketiganya acap kali berkait satu dengan yang lain. Artinya, calon legislatif itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal. Argumen yang terbangun adalah bahwa semakin besar calon legislatif yang mampu mengakumulasi tiga modal itu, maka semakin berpeluang pula terpilih sebagai anggota legislatif.

Kesadaran tentang peran politik gender berasal dari kemunculan yang di sebut feminisme pada gelombang pertama yang muncul di adad ke-19 hingga 1960-an yang berusaha mencapai kesetaraan gender di wilayah hukum dan hak-hak politik terutama hak pilih. Akan tetapi, kemunculan feminisme gelombang kedua pada 1960-an dan 1970-an membentuk kembali feminisme sebagai satu bentuk politik identitas dan dicirikan oleh sebuah fokus yang lebih radikal pada pembebasan kaum perempuan khususnya lingkup privat. (Heywood Andrew, 2014: 284).

Sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat modern, pandangan feminisme semakin mendapat tempat, setidaknya ada tiga aliran feminisme. Pertama, feminisme liberal yang fokus perhatiannya adalah kritik terhadap ketidakadilan dan pembudayaan eksplotasi perempuan dalam media dan budaya. Kedua, feminisme radikal yang melihat bahwa kepentingan laki-laki dan perempuan secara fundamental memang berbeda, menghormati hukum patriarkat atau control dan represi. Ketiga, feminisme sosialis yang menerima hukum patriarkat, tetapi mencoba untuk memasukan dalam analisis kapitalisme. (Abdillah S, Ubet 2002: 56)

Feminisme sebagai kumpulan pemikiran, pendirian dan aksi dari kesadaran, asumsi dan kepedulian terhadap ketidakadilan, ketidaksetaraan, penindasan atau diskriminasi terhadap kaum perempuan, serta gerakan yang berusaha untuk menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya gerakan feminisme memiliki suatu visi masyarakat yang adil, demokrasi dan sejahtera, dalam konteks ilmiah feminisme dapat dikategorikan sebagai salah satu teori perubahan sosial alternative. (Mansour, 2008: 148)

Walby dalam John T. Ishyami (2015: 392) berpendapat rezim gender merujuk kepada system atau pola kesetaraan atau ketidaksetaraan gender yang ditemukan dalam rumah tangga, pasar, masyarakat sipil, dan negara. Rendahnya kapasitas politik perempuan dalam institusi politik modern dan banyak di belahan dunia lainnya telah menjadi argument dasar kampanye kebijakan affirmative bagi perempuan. Menurut Hemas GKR, dkk (2013: 27) kebijakan *affirmative action* adalah tindakan khusus sementara dalam bentuk kebijakan,

peraturan atau program khusus dimaksudkan untuk mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan dan lemah secara social-politik, seperti kelompok miskin, penyandang disabilitas, buruh, petani, nelayan termasuk kelompok perempuan.

Affirmative action merupakan jalan keluar dari permasalahan kaum perempuan atas ketinggalannya dan suatu yang tidak mungkin di capai dengan sifat natural tanpa adanya kebijakan atau tindakan khusus, dalam mengatasi ketertinggalannya dari kaum laki-laki. Jadi affirmative action boleh dikatakan sebagai kekecualian dari pola demokrasi. Karena sifatnya kekecualian, maka tindakan ini khusus, terkadang pula disebut diskriminasi positif. Mengapa disebut diskriminasi positif, karena demi memperhatikan pemberdayaan kaum perempuan dalam politik, artinya demokrasi dalam proses politik tersebut seakan menjadi tidak tampak, namun kebijakan khusus demikian masih dapat dinilai positif sebagai langkah mengatasi kesenjangan gender.

Pada aturan undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada pasal 29 ayat 1a menyatakan bahwa: *“Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilaksanakan melalui seleksi kadernisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”*. Dalam UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Pasal 4 ayat 2e menyatakan bahwa: *“menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota*.

Kebijakan *affirmative action* memberikan jaminan hanya sebagai syarat partai untuk dalam pemilihan legislatif tetapi tidak memberikan jaminan terhadap perempuan untuk terpilih. Rendahnya kapabilitas perempuan dalam bidang politik berdampak pada keterpilihan perempuan serta pengaruh pemilih. Menurut Heywood Andrew (2014: 382) perilaku pemilih dibentuk oleh pengaruh-pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendek yang paling utama adalah keadaan ekonomi yang mencerminkan fakta bahwa terdapat hubungan antara popularitas sebuah pemerintah dengan variabel ekonomi seperti pengangguran, inflasi dan pendapatan masyarakat, pengaruh jangka pendek lainnya adalah kepribadian dan penampilan dari pemimpin partai, ini sangat penting karena pemberitaan media menggambarkan para pemimpin sebagai citra dari partai mereka. Semua pertimbangan semacam itu dalam konteks pengaruh-pengaruh psikologi, sosiologi, ekonomi dan ideologis pada *voting*. Model-model yang paling signifikan adalah model identifikasi partai, model sosiologis, model pilihan rasional, model ideology dominan.

Menurut Firmanzah dalam Efriza (2012: 483) menjelaskan mengenai empat tipologi perilaku pemilih, yaitu:

a) Pemilih Rasional

Pemilih memiliki orientasi tinggi pada “policy-problem-solving” dan berorientasi rendah untuk faktor ideology. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kandidat dalam program kerja. Pemilih jenis ini memiliki jenis ciri khas yang tidak begitu mementingkan ideology kepada suatu partai politik atau seorang kandidat. Faktor seperti paham, asal usul, nilai tradisional, budaya, agama dan psikogafis di pertimbangkan, tetapi bukan hal yang signifikan. Firmanzah dalam Efriza (2012: 483).

b) Pemilih Kritis

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau kandidat dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis mereka selalu menganalisis kaitan antara system nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang dibuat. Firmanzah dalam Efriza (2012:484).

c) Pemilih Tradisional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideology yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau kandidat sebagai suatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Kebijakan semisal ekonomi, kesejahteraan, pemerataan pendapatan, pendidikan, dan pengurangan angka inflasi dianggap parameter kedua. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figure dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seseorang kandidat. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut. Firmanzah dalam Efriza (2012:485).

d) Pemilih Skeptis

Pemilih keempat adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideology cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kandidat, tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena ikatan ideology mereka memang rendah sekali. Mereka kurang memperdulikan “*platform*” dan kebijakan partai politik. Golongan putih di Indonesia atau di manapun sangat didominasi oleh jenis pemilih ini. . Firmanzah dalam Efriza (2012:485).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya yaitu keterpilihan calon legislatif perempuan partai GOLKAR di Kabupaten SIDRAP disebabkan sosialisasi perempuan jauh lebih baik kemudian di dukung oleh lembaga GOLKAR dalam bentuk fasilitas. Kapabilitas yang dimiliki calon legislatif sudah layak, serta popularitas dan figur di masyarakat sangat mendukung. Pada pemilihan legislatif tahun 2014 ada tiga modal yang harus dipenuhi calon legislatif, pertama modal sosial, kedua modal politik dan ketiga modal ekonomi. Yang terlihat dilapangan modal ekonomi sangat jauh lebih berpengaruh dibanding dengan modal yang lain, selain itu pemilih perempuan yang mudah dipengaruhi dengan modal ekonomi.

Adapun saran penelitian adalah Partai GOLKAR merupakan partai besar dan berpengalaman diberbagai pemilihan, seharusnya dalam rekrutmen calon legislatif sesuai mekanisme yang dapat menghasilkan kader berkapabilitas dengan melakukan pembekalan dari awal agar perempuan dapat bersaing dengan laki-laki. Pendidikan politik sangat penting bagi perempuan sehingga lebih berani keluar dari lingkungan keluarga ke lingkungan publik sehingga perempuan mendapatkan posisi sama dengan laki-laki. Berbagi kebijakan untuk perempuan dalam kesetaraan gender termasuk regulasi kebijakan *affirmative action* yang memberikan ruang perempuan minimal 30% keterwakilan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah S. Ubet. 2002. *Politik Identitas Etnis*. Magelang: Yayasan Indonesia Siatera.
- Anugrah SH dan Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Efriza. 2012. *Political Explore*. Bandung: ALFABETA.
- Fadli, Muhammad, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas dan Achmad Zulfikar. (2018) Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015. *ARISTO* Vol. 6 No. 2 (2018).
- Fakih, Mansour. 2008. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: INSIST PRESS.
- Firmanzah. 2008. *Mengelolah Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hemas, GKR, Dkk. 2013. *Perempuan Parlemen Dalam Cakrawala Politik Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.

Heywood Andrew. 2014. *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Indra, Gosal. Elektabilitas Sahrul Yasin Limpo pada Pemilihan Gubernur 2013 di Kabupaten Toraja Utara. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Ishiyama, Jonh T & Breuning Marjike. 2013. *Ilmu Politik Paradigma Abad Kedua Puluh Satu*, Kencana, Jakarta.

Kambo, Gustiana Anwar. (2017). Penguatan Identitas Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 3 No. 1, Januari 2017.

KIPP. *Analisa Perilaku Pemilih dalam Memilih Calon atau Peserta Pemilu di Kabuapen Sampang*, KPU, 2015.

Misykiyah, Noviia Nailul. 2016. Faktor Pendorong Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan di Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Kudus 2014. Semarang: Universitas Diponegoro.

Nimrah, Siti dan Sakaria Sakaria. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 1 No. 2, Juli 2015.

Rahman, Laila Rahmawati, Jusuf Harsono dan Diah Suluh Kusuma Dewi. (2017). Pengalaman Partai Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 dalam Pemenuhan Kuota Keterwakilan Perempuan di Kabupaten Ponorogo. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 3 No. 1, Januari 2017.

Silaban, Ahmad Hening. (2015). Implementasi Politik Perempuan di Kota Makassar. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 1 No. 1, Januari 2015.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.